

DAMPAK KEBIJAKAN MONETER TIONGKOK TERHADAP EKSPOR IMPOR DI KAWASAN ACFTA

(Studi Kasus: Indonesia, Malaysia, Thailand)



*Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu
Hubngan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

Oleh:

Muhammad FahmiMasda

E131 12 259

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2016

Abstraksi

Muhammad Fahmi Masda, Dampak Kebijakan Moneter Tiongkok terhadap Ekspor Impor di Kawasan ACFTA, dibawah bimbingan H. Dawis, MA, Ph.D selaku pembimbing I dan Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si selaku pembimbing II, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan moneter Tiongkok terhadap ekspor-impor di Kawasan ACFTA. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud di atas, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian. Deskriptif-Analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi pustaka. Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif, dan untuk pembahasan masalah penulis menggunakan teknik penulisan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter Tiongkok pada tahun 2013-2014 berpengaruh negatif terhadap perdagangan di Kawasan ACFTA akibat defisit pada neraca perdagangan Indonesia, Malaysia dan Thailand terhadap Tiongkok, yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi ACFTA secara keseluruhan pada tahun 2015. Penelitian ini juga menunjukkan hubungan antara kondisi ekonomi domestik Tiongkok, hegemoni Amerika di Kawasan Asia Timur dan Tenggara melalui *Trans-Pacific Partnership* dan upaya Tiongkok untuk memasukkan Yuan ke dalam keranjang *Special Drawing Rights* IMF, dengan strategi kebijakan moneter Tiongkok.

Kata Kunci: Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Thailand, Kebijakan Moneter, PBOC, ACFTA, Perdagangan Internasional

Abstract

Muhammad Fahmi Masda, the Impact of Chinese Monetary Policy on Exports and Imports within the ACFTA, under the supervision of H. Dawis, MA, Ph.D as supervisor I and Drs. Munjin Syafik Ash'ari, M.Si as supervisor II, the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to analyse the Impact of Chinese Monetary Policy on Exports and Imports within the ACFTA. To achieve the aforementioned objective, the research uses Descriptive-Analytical method. The data collection technique the author used library research. Authors analyzed the data using qualitative analysis techniques supported by quantitative data, and for the discussion of problems the author uses deductive writing techniques.

The results of this study indicate that Chinese monetary policy in 2013-2014 has negative effect on trade in ACFTA due to a deficit in trade balance of Indonesia, Malaysia, and Thailand to China which led to a decrease in overall economic growth ACFTA in 2015. The study also shows the relationship of Chinese domestic economic conditions, American hegemony in East Asia and Southeast through the Trans-Pacific Partnership and the efforts of Chinese Yuan to enter into the Special Drawing Rights basket of the International Monetary Fund, towards China's monetary policy strategy.

Keywords: China, Indonesia, Malaysia, Thailand, Monetary Policy, PBOC, ACFTA, International Trade

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Belakangan ini terdapat fenomena ekonomi politik yang sangat mencolok di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya adalah berlomba-lombanya Negara Asia Tenggara melakukan integrasi ekonomi baik pada level bilateral, regional maupun ekstra-regional. ASEAN telah menandatangani berbagai perjanjian perdagangan bebas di dalam dan di luar kawasan melalui berbagai perjanjian seperti *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA), *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* (FTA), *ASEAN-Australia-New Zealand FTA* (AANZFTA). Pada tahun 2012 ASEAN memulai negosiasi penggabungan perjanjian perdagangan terpisah dengan Australia, Selandia Baru, Tiongkok dan India melalui perjanjian *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSEP).¹ Pada Desember 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) telah berlaku secara resmi. Integrasi ekonomi seperti yang terjadi saat sekarang menunjukkan terjalinnya hubungan internasional yang baik antara negara-negara yang terlibat dalam

¹Kemenlu RI “Kerjasama Ekonomi ASEAN
(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FJ6Yn_xCCK8J:www.kemlu.go.id/Documents/Kerjasama%2520Ekonomi%2520ASEAN.doc+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id) diakses pada 9 Februari 2016

perjanjian integrasi ekonomi tersebut. Dengan kata lain, perjanjian ekonomi menuntut terdapatnya situasi politik yang kondusif di tempat dimana perjanjian tersebut diterapkan.

Integrasi ekonomi dimaksudkan untuk mencapai kepentingan ekonomi kawasan, salah satunya melalui penghapusan hambatan tarif dan non-tarif. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas perdagangan antara Negara anggota secara berkelanjutan yang pada akhirnya menciptakan pasar tunggal dimana masing-masing Negara saling berkompetisi. Adanya pasar tunggal akibat adanya integrasi ekonomi ini mengakibatkan kebijakan ekonomi di suatu Negara dapat berpengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi di Negara lainnya yang terikat oleh perjanjian integrasi ekonomi yang sama. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Salvatore² menurutnya integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatan.

ACFTA adalah salah satu bentuk perjanjian integrasi ekonomi yang tertua dan paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. ACFTA tidak hanya mencakup perdagangan barang dan jasa, tapi juga investasi dan berbagai bentuk kerjasama ekonomi lainnya. Setelah ACFTA disepakati oleh Negara anggotanya dan mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2010, AFCTA menjadi kawasan perdagangan bebas terbesar di

² Dominick Salvatore. 1997. *International Economics*. New Jersey: Prentice Hall- Gale, hal 321

dunia dalam ukuran jumlah penduduk dan ketiga terbesar dalam ukuran volume perdagangan.³

Awalnya ACFTA merupakan perjanjian integrasi ekonomi yang diusulkan oleh Tiongkok pada November 2010. Saat itu Tiongkok ingin menggantikan dominasi Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang sebagai mitra dagang utama ASEAN. Setelah terjadinya insiden *Tiananment Square* pada tahun 1989, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga menjadi ancaman serius bagi Amerika Serikat yang pada saat itu sementara meluncurkan politik pembendungan di Beijing. Keinginan Tiongkok untuk melakukan ekspansi pasar bukan hanya didasari oleh kepentingan geopolitik saja, tetapi Tiongkok juga mengharapkan keuntungan ekonomi dari harga bahan mentah yang murah serta produk pertanian ASEAN. Kedua hal ini lah yang membuat Tiongkok memiliki kepentingan ekonomi politik yang besar di Kawasan ASEAN.

Masuknya Tiongkok ke ASEAN melalui ACFTA telah banyak berpengaruh terhadap ekonomi domestik Negara anggota ASEAN. Singapura muncul sebagai negara industrialisasi baru bersamaan dengan Korea, Taiwan dan Hongkong, sementara Malaysia, Thailand dan Indonesia telah berubah dari ekonomi pertanian yang stagnan menjadi ekonomi manufaktur yang dinamis melalui pertumbuhan yang berkelanjutan dan industrialisasi. Belakangan ini, Negara ASEAN lainnya

seperti Vietnam juga mulai memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat dan konsisten. Dengan pertumbuhan ekonomi kawasan yang mengesankan selama tiga dekade, ASEAN banyak dilihat oleh Negara berkembang lainnya sebagai model pembangunan ekonomi yang berhasil.⁴

Keuntungan integrasi ekonomi dengan Tiongkok yang dirasakan oleh ASEAN saat ini diikuti dengan semakin rentannya ASEAN terhadap pengaruh kebijakan ekonomi domestik Tiongkok khususnya dalam bidang Moneter. Pemerintah Tiongkok melalui Bank Rakyat Tiongkok (PBOC), dapat mengeluarkan kebijakan moneter yang hanya berdasarkan pada kepentingan nasionalnya namun memiliki dampak terhadap ekonomi kawasan ASEAN secara keseluruhan.

Selama beberapa decade terakhir, PBOC banyak mengambil kebijakan moneter yang dianggap kontroversial, bahkan bagi penduduk Tiongkok sendiri. Salah satunya ketika PBOC kembali mendevalusi Reminmi sebanyak 1,85% terhadap dollar Amerika Serikat dan 2,2% terhadap Euro pada perdagangan Selasa 8 November 2015 sebagai usaha untuk melepaskan diri dari krisis dan meningkatkan nilai ekspor Tiongkok dengan drastik.⁵

Hal ini dianggap bertolak belakang dengan usaha Tiongkok untuk mengubah reputasi internasionalnya sebagai pemain nakal menjadi

⁴ The Prospect of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA),
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.458.206&rep=rep1&type=pdf>,
Diakses pada 10 Februari 2016

⁵ Devaluasi Yuan dan Dampaknya bagi Indonesia
<http://market.bisnis.com/read/20150813/191/462279/devaluasi-yuan-dan-dampak-jangka-panjang-bagi-indonesia>. Diakses pada 10 Februari 2016

kekuatan ekonomi yang bertanggung jawab, khususnya mengingat bahwa Yuan akan secara resmi dimasukkan ke dalam keranjang SDR Dana Moneter Internasional⁶ pada oktober 2016, bersama dengan Euro, Dollar, Yen dan Pound Sterling.⁷

Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga tidak dapat dilepaskan dari peran dan kontribusi Bank Rakyat Cina, khususnya dalam memformulasikan kebijakan moneter Tiongkok. Pencapaian yang diperoleh Bank Rakyat Cina merupakan buah dari serangkaian reformasi finansial serta lebih terbukanya Tiongkok setelah menjadi anggota *World Trade Organization (WTO)* pada tahun 2001. Bank Rakyat Cina secara independen menjalankan fungsi sebagai Bank Sentral pada tanggal 1 Januari 1984, yang menandai diterapkannya kebijakan moneter modern serta masuknya peraturan makro ekonomi pemerintah Tiongkok ke dalam tahapan sejarah yang baru.

Kebijakan moneter Bank Sentral Tiongkok tidak hanya mempengaruhi ekonomi domestik Tiongkok, tapi juga berdampak pada perdagangan internasional di Kawasan ACFTA, yang dengan demikian juga berdampak pada ekonomi domestik negara dalam perjanjian tersebut. Indonesia, Malaysia dan Thailand tercatat sebagai tiga Negara ASEAN dengan jumlah ekspor-impor terbanyak dengan Tiongkok pada tahun

⁶ SDR (*Special Drawing Rights*) merupakan aset mata uang cadangan yang diciptakan oleh IMF pada tahun 1969 untuk menambah jumlah aset cadangan resmi masing-masing negara anggota IMF. Diamabil dari IMF Factsheet <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm>, Pada tanggal 10 Februari 2016

⁷*Ibid*

2012-2013.⁸ Ketiga Negara yang berada pada satu perjanjian pasar bebas dengan Tiongkok (ACFTA) ini tentunya tidak semata-mata diuntungkan dengan kebijakan moneter Tiongkok, khususnya berkaitan dengan devaluasi Yuan. Turunnya nilai Yuan terhadap mata uang lain seperti Dollar Amerika dan Euro secara sistematis mengakibatkan Tiongkok dapat meningkatkan jumlah ekspor dan sekaligus mengurangi jumlah impornya. Ekspor Tiongkok dapat meningkat dengan harga komoditas yang menjadi lebih kompetitif di Negara lain, sementara impor Tiongkok menurun akibat daya beli penduduk Tiongkok yang akan terus tergerus, kedua hal tersebut disebabkan oleh rendahnya nilai tukar Yuan terhadap mata uang lainnya.

Melihat fenomena ini, penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian terhadap Dampak Kebijakan Moneter Tiongkok Terhadap Ekspor-Impor di Kawasan ACFTA.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh Bank Sentral, dewan valuta atau badan dewan lainnya yang menentukan jumlah dan tingkat pertumbuhan uang yang beredar dalam perekonomian, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai tukar. Kebijakan moneter dilaksanakan dengan menjalankan instrumen moneter seperti; mengatur nilai tukar, penurunan/penambahan suku bunga, membeli dan menjual

⁸ China Statistical YearBook. 2013. *National Bureau of Statistics of China*. China Statistic Press: Beijing

sertifikat pemerintah dan mengatur jumlah cadangan uang bank.⁹

Berdasarkan artikel 3, konstitusi PBOC, tujuan dari kebijakan moneter pemerintah Tiongkok adalah untuk menjaga stabilitas nilai mata uang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai kepentingan tersebut, pemerintah Tiongkok telah mengimplementasikan berbagai paket kebijakan moneternya.

Penelitian ini akan fokus membahas mengenai strategi kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh pemerintah Tiongkok setelah reformasi sistem finansial besar-besaran yang mulai terasa pada tahun 2008 dimana Tiongkok telah banyak membuka sektor perbankan pada pihak swasta, membuat nilai tukar Yuan lebih *flexible* dan meliberalisasi suku bunganya. Pada tahun 2012, Pemerintah Tiongkok menghapus sistem persyaratan uang cadangan bank yang dulunya digunakan untuk mencegah intervensi dari pasar tukar asing. Bersamaan dengan semua inovasi finansial tersebut, pasar finansial Tiongkok juga meningkat dengan pesat. Produk finansial modern seperti *wealth management product* dan *mutual funds* telah banyak dikembangkan serta sistem pembayaran modern telah diperluas sampai ke semua kota-kota besar¹⁰.

Meningkatnya keterbukaan Tiongkok pada peredaran finansial serta transisi menuju ke arah orientasi pasar (*market oriented approach*) telah banyak mempengaruhi warna kebijakan moneter Tiongkok saat ini.

⁹ Defenisi kebijakan moneter diambil melalui <http://www.investopedia.com/terms/m/monetarypolicy.asp>, diakses pada tanggal 10 Februari 2016

¹⁰ Chinese Monetary Policy and Interest Rate Liberalization <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1475.pdf>, diakses pada 10 Januari 2015

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu ;

- 1) Apakah faktor-faktor yang melatar belakangi kebijakan moneter pemerintah Tiongkok saat sekarang ini?
- 2) Bagaimana dampak kebijakan moneter Tiongkok bagi Indonesia, Malaysia dan Thailand, khususnya dalam ekspor dan impor?
- 3) Bagaimana Prospek dan Tantangan Kawasan Perdagangan ACFTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi rangkaian kebijakan moneter pemerintah Tiongkok saat sekarang ini
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari kebijakan moneter Tiongkok bagi Indonesia, Malaysia dan Thailand, khususnya dalam ekspor dan impor
3. Untuk mengetahui bagaimana prospek dan tantangan kawasan perdagangan ACFTA

b. Kegunaan

1. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi mengenai kebijakan moneter Tiongkok serta bagaimana dampaknya bagi Negara-negara dalam kawasan ACFTA.
2. Untuk memberikan informasi bagi pengkaji hubungan internasional khususnya yang tertarik pada kajian Ekonomi Politik di Kawasan ACFTA.

D. Metode Penelitian.

1. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Analitik. Deskriptif-analitik merupakan tipe yang menggambarkan fenomena dengan bantuan data lalu ditarik kesimpulan. Tipe ini menggambarkan (deskriptif) bagaimana jenis kebijakan moneter Tiongkok, lalu berdasarkan data yang diperoleh penulis menganalisa (analitik) dampak kebijakan tersebut pada perdagangan regional di Kawasan ACFTA, dalam hal ini; Indonesia, Malaysia dan Thailand.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode *Library Research* *Library research* sendiri merupakan metode dengan cara mengumpulkan data dari beberapa Literature yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Literatur yang akan digunakan oleh penulis berupa buku, jurnal, dokumen, surat kabar, situs-

situs internet ataupun laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti. Bahan-bahan tersebut akan diperoleh melalui:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin

3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data sekunder sendiri adalah data yang diperoleh dari beberapa literatur yang berhubungan dengan objek penelitian ini. data tersebut bersumber dari buku, jurnal, surat kabar, portal berita online, beserta situs-situs resmi yang berkaitan dengan penelitian ini

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan penulis dalam menganalisis data penelitian adalah kualitatif. Untuk menganalisa permasalahan, penulis akan menggambarannya berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Penulis juga akan menambahkan data kuantitatif untuk memperkuat analisis kualitatif.

E. Kerangka Konseptual

Dalam bukunya *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tataan Dunia*, Walter S. Jones mengidentifikasi Integrasi Internasional sebagai proses pencapaian kondisi supranasional dimana urusan yang semula ditangani pemerintah nasional

beralih ke unit-unit politik yang lebih besar. Integrasi internasional dapat didefinisikan sebagai proses dimana aktor-aktor politik nasional dari berbagai negara diminta mengarahkan loyalitas, harapan dan kegiatan politik mereka ke institusi pusat yang baru dan lebih besar, yang lembaga-lembaganya memiliki atau mengambil alih yuridiksi yang semula berada ditangan negara bangsa.¹¹

Joseph Nye mencoba mendefinisikan konsep integrasi menggunakan pendekatan lain yang lebih spesifik, yaitu dengan memecah konsep itu ke dalam beberapa bagian atau dimensi dan menciptakan indikator untuk mengukurnya. Konsep Integrasi bisa dipilah-pilah menjadi Integrasi Ekonomi (pembentukan suatu ekonomi transnasional), integrasi sosial (pembentukan masyarakat transnasional) dan Integrasi politik (pembentukan sistem transnasional).¹²

Hal yang penting dalam integrasi ekonomi yang perlu dilihat disini adalah efek politik dari interdependensi ekonomi terhadap hubungan antara Negara-negara yang berdaulat. Karena itu yang indikator yang perlu diperhatikan dalam integrasi ekonomi adalah; pertama, interdependensi perdagangan yaitu proporsi ekstra intraregional terhadap ekspor total di kawasan, kedua jasa-jasa bersama, yaitu jumlah total belanja tahunan

¹¹Jones, W. S. (1993). *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatahan Dunia 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

¹²Robert , K., & Nye, J. (1971). *Transnasional Relations and World Politics*. Cambridge: Harvard

pekerjaan administrasi yang dikelola bersama (termasuk administrasi rencana integrasi perdagangan) sebagai presentase PDB.¹³

Sementara itu tingkatan-tingkatan integrasi ekonomi dijelaskan oleh Balassa dan Salvatore, mereka berpendapat bahwa integrasi ekonomi dilakukan secara berurutan dari yang sangat longgar hingga yang paling ketat. Pertama adalah area perdagangan bebas, yaitu tiap negara anggota bersepakat menghilangkan tarif perdagangan dan hambatan yang bersifat kuantitatif lainnya, namun masing-masing negara itu masih berhak untuk menetapkan aturannya sendiri dalam tarif terhadap negara-negara non anggota. Jika area perdagangan bebas menjadi integrasi ekonomi yang paling longgar atau yang pertama dalam pandangan Balassa, maka menurut Salvatore integrasi ekonomi yang paling longgar adalah pengaturan perdagangan preferensial (*preferential trade arrangements*) dan area perdagangan bebas menjadi tahap yang kedua. Pengaturan perdagangan bebas menurut Salvatore adalah menurunkan (tidak menghilangkan) hambatan perdagangan antara negara yang bersepakat, lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.¹⁴

Kedua, persekutuan pabean atau *customs union*, penghapusan hambatan dalam perdagangan atau pergerakan barang antara negara-negara anggota yang bersepakat (layaknya area perdagangan bebas)¹⁵, ditambah dengan penyeragaman aturan perdagangan, seperti tarif, dengan

¹³ *Ibid*

¹⁴ Dominic Salvatore, *Op, Cit.*, 321

¹⁵ Wang Jiangyu. 2006. *China, India and Regional Economic Integration in Asia: The Policy and Legal Dimensions*. Singapore Year Book of International Law: National University of Singapore, diakses pada 10 Februari 2015.

negara non anggota, hal ini biasa disebut dengan *common external tariffs*; Ketiga, tingkatan ekonomi yang lebih tinggi berikutnya adalah pasar bersama atau *common market*. Menurut Balassa dan Salvatore, dalam pasar bersama ini tidak hanya menghilangkan hambatan dalam perdagangan, tetapi juga hambatan pergerakan faktor produksi seperti orang, dan modal.¹⁶

Selain itu saat ini, menurut Wang, berkembang apa yang disebut dengan pasar tunggal atau *single market*, menurutnya pasar tunggal memiliki tingkat integrasi yang sedikit lebih tinggi daripada pasar bersama, mengutip Peter Lloyd, pasar tunggal adalah prinsip atau hukum satu harga dalam barang, jasa, dan juga faktor-faktor pasar dalam suatu wilayah, sehingga dalam pasar tunggal dilakukanlah penyeragaman peraturan dan prosedur antara negara-negara anggota kesepakatan;¹⁷

Keempat, tingkat ekonomi yang paling tinggi, menurut Balassa dan Salvatore adalah persatuan atau uni ekonomi (*economic union*). Dalam persatuan ekonomi, selain penghilangan hambatan-hambatan perdagangan dan faktor-faktor produksi, negara-negara yang tergabung dalam uni ekonomi bersepakat untuk melakukan penyeragaman dalam kebijakan ekonomi nasional. Penyeragaman itu akan terjadi di bidang moneter, fiskal, finansial, dan juga penanggulangan permasalahan terkait ekonomi lainnya.¹⁸

¹⁶Jiangyu Wang, *Op.Cit*

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*

Integrasi ekonomi pada dasarnya merupakan salah satu kajian dalam ekonomi politik internasional. Terdapat dua dimensi penting dalam ekonomi politik internasional yaitu dimensi ekonomi dan dimensi politik. Dimensi politik yang menjelaskan tentang bagaimana penggunaan kekuatan dilakukan oleh berbagai macam aktor, termasuk individu, kelompok dalam negeri, Negara (bertindak sebagai unit sendiri), organisasi internasional, *non-governmental organization* (NGO), serta perusahaan internasional (TNC/MNC). Semua aktor ini membuat keputusan mengenai distribusi hal-hal yang terlihat seperti uang dan produk atau barang yang tidak dapat dilihat seperti keamanan dan inovasi. Di hampir semua kasus, politik melibatkan proses pembuatan peraturan mengenai bagaimana Negara dan masyarakat mencapai tujuan mereka. Sementara dimensi ekonomi dari ekonomi politik internasional membahas bagaimana sumber daya yang terbatas (langka) didistribusikan kepada individu, group, dan Negara.¹⁹

Sementara itu fenomena integrasi ekonomi merupakan implementasi dari konsep liberalisme ekonomi (*economic liberalism*), khususnya neoliberalism. Liberalisme ekonomi adalah usaha untuk membuka ekonomi dengan cara menghilangkan hambatan dan batasan terhadap apa yang dapat dilakukan oleh aktor.²⁰ Sementara itu neoliberalisme merupakan pendekatan ekonomi dan sosial yang

¹⁹Perspective on International Political Economy
http://www.pearsonhighered.com/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/0205965156.pdf, diakses pada 10 Februari 2016

²⁰Definition of Liberal in Economy, <http://www.investopedia.com/terms/n/neoliberalism.asp>, diakses pada 11 Februari 2015

menginginkan untuk menggeser kontrol terhadap faktor-faktor ekonomi dari pihak pemerintah ke pihak swasta. Dengan demikian, neoliberalisme mengusulkan pemerintah untuk mengurangi belanja defisit, membatasi subsidi, mereformasi hukum pajak, menghapus nilai tukar tetap (*fixed exchange-rate*), membuka pasar untuk perdagangan dengan membatasi proteksi, badan usaha milik Negara (BMUN), membolehkan kepemilikan oleh perseorangan dan membantu proses deregulasi.²¹

Kebijakan moneter pemerintah Tiongkok yang nantinya akan dijabarkan melalui penelitian ini merupakan refleksi dari implementasi konsep liberalisme ekonomi dan neoliberalisme pada sektor keuangan. Meskipun secara politik Tiongkok tetap mempertahankan komunisme, tapi pemerintah banyak melakukan transisi ke arah liberalisme ekonomi, khususnya pada sektor moneter.

²¹*Ibid*

BAB III

KEBIJAKAN MONETER TIONGKOK DAN KAWASAN EKONOMI ACFTA

A. Kerjasama Ekonomi di Kawasan ACFTA

Proses menuju kesepakatan perjanjian ACFTA diawali dengan dilakukannya pertemuan tingkat kepala negara antara negara-negara ASEAN dan Cina di Bandar Seri Begawan, Brunei pada tanggal 6 Nopember 2001 yang kemudian disahkan melalui penandatanganan “Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Rakyat Cina” di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002. Perjanjian di sektor barang menjadi bentuk konkrit kerjasama ekonomi pertama di pihak ASEAN dan Cina, yang ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan *Trade in Goods Agreement* dan *Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos.²²

Perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan Tiongkok mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2010. Perjanjian tersebut mencakup area perdagangan dengan populasi terbanyak yaitu sebanyak 1,9 miliar orang dan ukuran ekonomi terbesar setelah North American Free Trade (NAFTA) dan Uni Eropa (EU).²³ Sebagai bagian dari perjanjian, tarif rata-

²² Sigit Setiawan, ASEAN-China FTA: Dampaknya Terhadap Ekspor-Indonesia dan Cina http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_01.%20ASEANCHINA%20FTA%20Dampak%20Ekspor.pdf diakses pada 08 April 2016

²³ S. Rajaratnan School of International Studies. 2012. *ASEAN-China Free Trade Area*. Booksmith: Singapore.

rata ekspor barang dari ASEAN ke Tiongkok diturunkan dari 9,8 persen menjadi 0,1 persen pada tahun 2010, sementara tarif rata-rata untuk ekspor barang Tiongkok ke 6 negara pertama ASEAN –Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura- diturunkan dari 12,8 persen menjadi 0,6 persen. Pada tahun 2015, kebijakan *zero-tariff rate* terhadap 90 persen barang Tiongkok telah diterapkan terhadap 4 negara anggota baru ASEAN –Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.²⁴

Dalam skema perjanjian tersebut, negara-negara yang menjadi anggota perjanjian saling memberikan *preferential treatment*²⁵ di tiga sektor: sektor barang, jasa dan investasi dengan tujuan memacu percepatan aliran barang, jasa dan investasi diantara negara-negara anggota sehingga dapat terbentuk suatu kawasan perdagangan bebas. *Preferential treatment* adalah perlakuan khusus yang lebih menguntungkan dibandingkan perlakuan yang diberikan kepada negara mitra dagang lain non anggota pada umumnya. Dalam kesepakatan di sektor barang, komponen utamanya adalah *preferential tariff*.

Proses menuju kesepakatan perjanjian ACFTA diawali dengan dilakukannya pertemuan tingkat kepala negara antara negara-negara ASEAN dan Cina di Bandar Seri Begawan, Brunei pada tanggal 6 Nopember 2001 yang kemudian disahkan melalui penandatanganan “Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Rakyat Cina” di

²⁴ ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration (pdf)

²⁵ *Preferential tariff* dalam skema perdagangan barang ACFTA ditetapkan atas dasar urutan kategori produk yang paling siap untuk diliberalisasikan terlebih dulu

Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002. Perjanjian di sektor barang menjadi bentuk konkrit kerjasama ekonomi pertama di pihak ASEAN dan Cina, yang ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan *Trade in Goods Agreement* dan *Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos.²⁶

Untuk mengevaluasi dampak dari ACFTA, perlu dilakukan *impact assessment* terhadap perjanjian perdagangan barang ACFTA. Salah satu indikator penting untuk menilai dampak suatu *free trade agreement* (FTA) adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan salah satu dari tiga indikator untuk menghitung dampak dari suatu FTA terhadap suatu negara dari aktivitasnya dalam perdagangan internasional. Sementara itu, salah satu komponen pendapatan nasional dalam model Keynesian empat sektor adalah kontribusi ekspor. Perubahan kontribusi ekspor terhadap pendapatan nasional negara anggota ACFTA (Indonesia, Malaysia, Thailand) dan Cina dalam konteks berlaku efektifnya perjanjian perdagangan barang ACFTA dapat mengindikasikan dampak dari ACFTA terhadap kedua negara.²⁷

**Tabel 3.1: Perdagangan Bilateral Tiongkok dengan ASEAN
(Indonesia, Malaysia, Thailand)**

²⁶*Opcit*

²⁷ Llyoid, P., D. Maclaren. 2004. *Gains and Losses from Regional Trading Agreements: A Survey*. The Economic Record, hal. 445-467

Country		USD million				Share of ASEAN (%)			
		1998	2003	2008	2013	1998	2003	2008	2013
ASEAN Total	Export	10,919	30,935	114,139	244,133	100%	100%	100%	100%
	Import	12,589	47,350	117,012	199,402	100%	100%	100%	100%
	Balance	(1,670)	(16,415)	(2,873)	44,731	100%	100%	100%	100%
Indonesia	Export	1,172	4,482	17,210	36,947	10.7%	14.5%	15.1%	15.1%
	Import	2,462	5,754	14,387	31,479	19.6%	12.2%	12.3%	15.8%
	Balance	(1,290)	(1,272)	2,823	5,469				
Malaysia	Export	1,594	6,142	21,383	45,941	14.6%	19.9%	18.7%	18.8%
	Import	2,675	13,998	32,131	60,068	21.2%	29.6%	27.5%	30.1%
	Balance	(1,080)	(7,856)	(10,748)	(14,128)				
Thailand	Export	1,170	3,829	15,521	32,738	10.7%	12.4%	13.6%	13.4%
	Import	2,423	8,829	25,636	38,518	19.2%	18.6%	21.9%	19.3%
	Balance	(1,253)	(5,000)	(10,116)	(5,780)				

Sumber : China Ministry of Commerce, via CEIC database.²⁸

a. Indonesia

Sebanyak 602 juta penduduk ASEAN, 250 juta hidup di Indonesia, Negara dengan populasi terbesar dalam blok perdagangan ASEAN-Tiongkok. Dalam hal jumlah PDB nominal, Indonesia merupakan ekonomi terbesar di ASEAN. Bersama dengan India dan Tiongkok, Indonesia merupakan salah satu dari tiga ekonomi berkembang di Asia yang merupakan Negara anggota kekompok 20 (G20). Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 5.8 persen dari tahun 2003

²⁸US-China Economic and Security Review Commission http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/annual_reports/2015%20Executive%20Summary%20and%20Recommendations.pdf diakses pada 15 Mei 2016

sampai tahun 2012, tertinggi ke-4 diantara Negara anggota ASEAN.²⁹ Namun, Indonesia relatif masih merupakan Negara miskin: berdasarkan bank dunia, PDB per capita Indonesia pada tahun 2013 adalah 3.475 USD, yang menempatkan Indonesia pada kategori Negara berpenghasilan menengah dan rendah. Indonesia masih berupaya mengatasi kemiskinan dan tingkat pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, korupsi, peraturan lingkungan yang kompleks dan distribusi sumber daya yang tidak merata di antara kawasan.³⁰ Sektor pertanian mendominasi kegiatan ekonomi, sementara sektor jasa berkontribusi lebih sedikit terhadap PDB, dibandingkan dengan sektor industri.³¹

Rasio perdagangan terhadap PDB (*Trade-to-PDB ratio*) Indonesia adalah salah satu yang terendah di blok ASEAN. Berbeda dengan kebanyakan Negara tetangganya, Indonesia memiliki defisit perdagangan barang dengan dunia. Tiongkok mencerminkan pasar ekspor terbesar kedua Indonesia dan sekaligus sebagai Negara sumber impor terbesarnya. Bersamaan dengan Jepang dan Singapura, Cina merupakan penyebab utama defisit perdangan tersebut. Namun hal tersebut tidak terjadi selamanya, data dibawah menunjukkan transisi neraca perdagangan Indonesia dari defisit ke surplus, yang dimulai pada tahun 2007. Sementara itu, import dari Tiongkok meningkat

²⁹ CIA World Factbook, "Indonesia." <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html> diakses pada 10 Mei 2016

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

dengan perlahan dari 4 juta miliar dollar lebih pada tahun 2003 sampai hampir 37 miliar dollar pada tahun 2013.

Tabel 3.2 : Mitra Ekspor dan Impor Indonesia

	Exports			Imports	
	Value (US\$ m)	Share (%)		Value (US\$ m)	Share (%)
1 Japan	\$ 27,086	14.8%	1 China	\$ 29,849	16.0%
2 China	\$ 22,601	12.4%	2 Singapore	\$ 25,581	13.7%
3 Singapore	\$ 16,686	9.1%	3 Japan	\$ 19,284	10.3%
4 US	\$ 15,741	8.6%	4 Malaysia	\$ 13,322	7.1%
5 India	\$ 13,031	7.1%	5 South Korea	\$ 11,592	6.2%
Other	\$ 87,407	47.9%	Other	\$ 87,001	46.6%
Total	\$182,552	100%	Total	\$ 186,629	100%

Sumber : China Ministry of Commerce, via CEIC Database

Tabel 3.3 : Perdagangan Barang Tiongkok dengan Indonesia

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
export	4,482	6,257	8,349	9,453	12,609	17,210	14,744	21,978	29,263	34,293	36,947
import	5,754	7,212	8,430	9,610	12,380	14,387	13,538	20,760	31,323	32,033	31,479
balance	-1,272	-955	-81	-157	229	2,823	1,206	1,219	-2,059	2,260	5,469

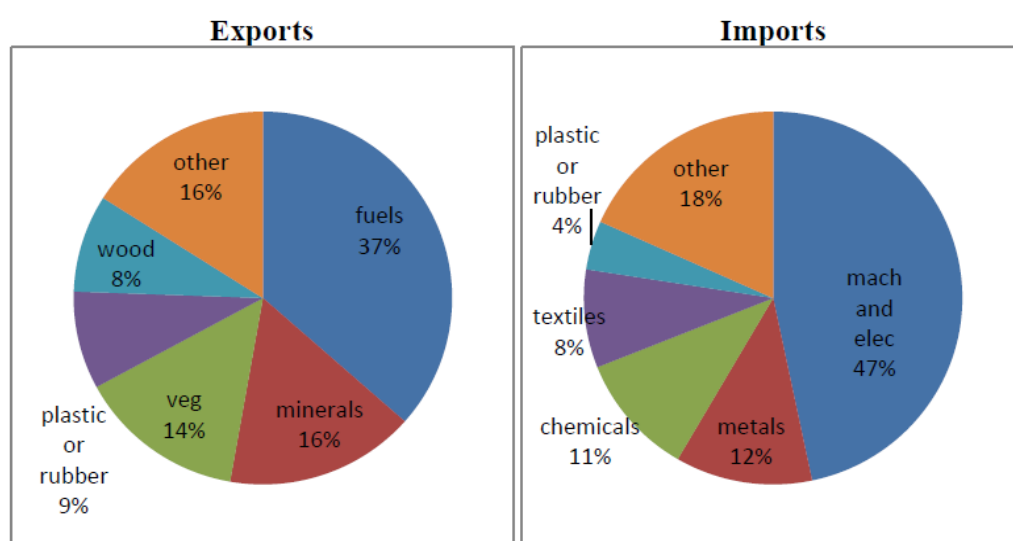
Sumber : China Ministry of Commerce, via CEIC Database³²

Komposisi perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok menyerupai pola sumber daya untuk manufaktur. Hampir setengah dari

³²*Ibid*

barang impor dari Tiongkok adalah mesin dan produk elektronik, sampai tingkatan dimana Tiongkok menyumbang sepertiga belanja asing Indonesia dalam kategori ini. Sebaliknya, produk minyak, besi, kayu dan sayur-sayuran membentuk tiga perempat dari ekspor Indonesia ke Tiongkok. Bersama dengan Australia, Indonesia merupakan penyedia utama batu bara dan gas alam cair untuk area pesisir Tiongkok yang menggunakan energi dalam jumlah besar. Area pesisir Tiongkok mengalami kesulitan untuk mendapatkan energi minyak dari daerah barat Tiongkok.

Diagram3.1 :Rincian Perdagangan Indonesia denganTiongkok, 2013



Catatan : Veg = Vegetables

Sumber : World Bank Trade Statistic in 2013

Indonesia telah mengambil pendekatan campuran untuk diplomasi ekonomi dengan China . Di satu sisi, Indonesia telah menandatangani perjanjian perdagangan bilateral dengan Korea Selatan dan Jepang,

tetapi tidak dengan China, yang menunjukkan (seperti India) preferensi untuk hubungan perdagangan yang lebih dekat dengan tetangga Tiongkok yang lebih kaya. Ketika Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang mengajukan kasus sengketa WTO terpisah terhadap China pada bulan Maret 2012 tentang pembatasan ekspor mineral langka bumi, tungsten dan molibdenum. Indonesia bergabung dalam setiap keluhan ini sebagai pihak ketiga.³³ Sampai 2013, Jakarta telah banyak menandatangani berbagai MOU dengan Beijing, termasuk kerjasama bilateral di sektor energi dan mineral (2006) , hak kekayaan intelektual (2013) , dan kemitraan perikanan (2013).³⁴

b. Malaysia

Ekonomi Malaysia berjalan dengan baik selama 1 dekade terakhir. Pertumbuhan PDB riil rata-rata mencapai 5 persen antara tahun 2003 dan 2013, membawa Malaysia ke dalam kategori Negara berpenghasilan sedang ke tinggi, hanya dibelakang Singapura dan Brunei dalam hal kekayaan di antara Negara anggota ASEAN. Perdagangan merupakan bagian penting dari kesuksesan Malaysia (rasio perdagangan terhadap PDB Malaysia lebih dari 150 persen, dan

³³World Trade Organization, WTO Indonesia (https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm) diakses pada tanggal 10 Mei 2016

³⁴*Jakarta Post*, "Indonesia, China Sign MOU on Fishery Partnership (<http://www.thejakartapost.com/news/2013/10/03/indonesia-china-sign-mou-fishery-partnership.html>); Kangxin Partners PC, "China and Indonesia Sign MOU (<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=50a3af96-f354-4b60-b8c8-e42c225d9fbb>) and Dorothy Kosich, "China Signs MOU with Indonesia to Diversify Energy Supply," Mineweb.com diakses pada 10 Mei 2016

ekspor bersih menyumbang 8,9 persen dari PDB Malaysia pada tahun 2013.³⁵

Dengan 5 mitra dagang utama membuat kurang dari setengah dari total perdagangan barangnya, Malaysia tidak bergantung pada satu negara mitra dagangnya. Amerika merupakan 5 besar mitra dagang Malaysia, tapi dua pertiga perdagangan Malaysia berada di kawasan Asia. Setelah menjadi mitra dagang Jepang selama operasi manufaktur di Asia Tenggara, sekarang Malaysia lebih banyak berdagang dengan Tiongkok daripada Jepang (lihat Tabel 3.5, hal 57). Apakah Malaysia memiliki surplus perdagangan dengan Tiongkok tergantung dari referensi data pertama. Berdasarkan MOFCOM, Malaysia merupakan salah satu dari hanya 2 negara ASEAN yang mendapatkan surplus dari Tiongkok pada tahun 2013 (yang satunya adalah Thailand), dan sesuai yang terlihat pada (Tabel 3.6 hal, 37) Surplus Malaysia dengan Tiongkok tumbuh dari 7,8 miliar pada tahun 2003 menjadi 14 miliar pada tahun 2013. Sementara sebaliknya, data bank dunia menunjukkan Malaysia menerima defisit dengan Tiongkok sebanyak hampir 3,3 miliar di tahun 2013.

³⁵Data from *World Bank Trade Statistic 2013*

Tabel 3.4 Perdagangan Barang Tiongkok dengan Malaysia

	(US\$ millions)										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
exports	6,142	8,085	10,618	13,540	17,702	21,383	19,636	23,820	27,910	36,529	45,941
imports	13,998	18,162	20,108	23,577	28,737	32,131	32,224	50,396	62,026	58,253	60,068
balance	-7,856	-10,077	-9,490	-10,037	-11,036	-10,748	-12,589	-26,577	-34,115	-21,723	-14,128

Sumber : China Ministry of Commerce, via CEIC database 2003-2013.

Table 3.5 Mitra Ekspor dan Impor Malaysia

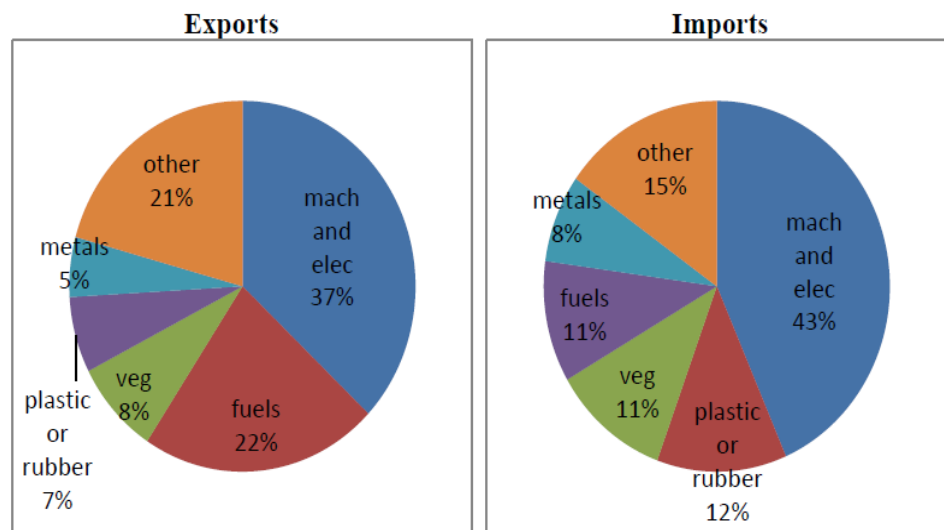
	Exports			Imports	
	Value (US\$ m)	Share (%)		Value (US\$ m)	Share (%)
1 Singapore	\$ 31,872	13.9%	1 China	\$ 33,774	16.4%
2 China	\$ 30,785	13.5%	2 Singapore	\$ 25,459	12.3%
3 Japan	\$ 25,318	11.1%	3 Japan	\$ 17,913	8.7%
4 US	\$ 18,461	8.1%	4 US	\$ 16,204	7.9%
5 Thailand	\$ 16,675	7.3%	5 Thailand	\$ 12,294	6.0%
Other	\$105,404	46.1%	Other	\$100,606	48.8%
Total	\$228,515	100%	Total	\$206,250	100%

Sumber : World Bank Trade Statistic 2013

Malaysia terintegrasi dengan kuat pada ke rantai penyediaan regional. Mesin dan produk elektrik terhitung sebanyak 48 persen dari ekspor Malaysia dan 57 persen dari impornya pada tahun 2013 (lihat diagram 3.2 hal, 56). Pola ini diperkuat dengan perdagangan Malaysia dengan Tiongkok. Aspek yang menarik dari perdagangan Malaysia adalah ekspor produk minyaknya. Malaysia hanya memproduksi 640.000 barel per hari (bpd) pada tahun 2013, kurang dari 1 persen total penyediaan. Jika dibandingkan dengan Negara

tetangganya Indonesia yang memproduksi 942.000 bpd, Tiongkok 4,46 juta bpd. Minyak menyumbang sebanyak 22 persen dari ekspor Malaysia kepada dunia, dan 11 persen dari eksportnya ke Tiongkok.

Diagram 3.2 :Rincian Perdagangan Malaysia dengan Dunia, 2013



Sumber : World Bank Trade Statistic 2013

Malaysia telah menjadi salah satu mitra dagang utama Tiongkok sejak tahun 2008, dan pemimpin kedua Negara telah berjanji untuk memperdalam perdagangan dan kerjasama ekonomi. Pada pertemuan pemimpin APEC November 2013 di Beijing, presiden Tiongkok Xi Jinping mengajak kedua Negara untuk membuat taman industri di Qinzhou (sebuah kota di provinsi Guangxi) dan Kuantan (Ibu Kota Pahang, Negara bagian ketiga terbesar di Malaysia sebagai projek penanda atas kerjasama Malaysia dan Tiongkok dan sebagai contoh untuk kerjasama

Tiongkok-ASEAN.³⁶ Presiden Xi juga lebih jauh mengajak untuk memperkuat kerjasama bilateral pada penegakan hukum dan keamanan serta pertukaran antara orang ke orang. Untuk dapat memfasilitasi perdagangan bilateral dan investasi, Malaysia dan Tiongkok memperluas kebijakan *bilateral currency swap agreement*³⁷ pada tahun 2012, yang menaikkan nilai RMB dari 80 miliar (12,7 miliar USD) menjadi 180 miliar (28,6 miliar USD).³⁸

c. Thailand

Thailand, negara dengan jumlah populasi terbanyak ke-4 dan ekonomi terbesar kedua di ASEAN dikategorikan oleh bank dunia sebagai negara berpenghasilan sedang atas. Berdasarkan bank dunia, PDB per kapita Thailand adalah sebanyak 5.779 USD, tertinggi ke empat di antara Negara anggota ASEAN. Namun, dalam satu dekade terakhir, Thailand memiliki tingkat pertumbuhan PDB terendah ke dua di ASEAN (diatas Brunei). Perekonomian Thailand telah menjadi khususnya rentan pada guncangan ekonomi ekstenal. Selama krisis finansial asia tahun

³⁶ Zhang Jianfeng, "China, Malaysia to Enhance Cooperation," *CCTV* (English service), November 10, 2014.

³⁷ *Bilateral Swap Agreement* (BSA) atau biasa disebut juga *Bilateral Currency Swap Agreement* (BCSA) ini adalah perjanjian kedua negara untuk transaksi tapi tidak menggunakan mata uang dolar, bisa menggunakan mata uang rupiah ataupun pakai mata uang negara yang dituju. Seperti misalnya dengan Jepang, maka bisa langsung menggunakan Yen (<http://uangindonesia.com/kurs-dolar-naik-bi-siapkan-solusi-bilateral-swap-agreement>) diakses pada 10 Mei 2016

³⁸ Reuters, "China, Malaysia Extend Currency Swap Deal," February 8, 2012. (...) diakses pada 10 Mei 2016

1997-1998, mengalami aliran modal keluar (*capital outflow*). Dengan ekspor dan kebijakan moneter yang sehat, Thailand mendapatkan kembali keseimbangan ekonominya pada awal tahun 2000-an, tetapi resesi ekonomi global sangat berpengaruh terhadap berkurangnya ekspor Thailand secara signifikan, dengan banyak sektor mengalami penurunan dua kali lipat. Pada akhir 2011, pemulihan ekonomi Thailand terganggu oleh banjir besar-besar di kawasan industri Bangkok serta 5 provinsi disekitarnya yang menyebabkan kerusakan pada sektor manufaktur di Thailand

Dengan rasio PDB terhadap perdagangan sebanyak 139 persen pada tahun 2013, Thailand (seperti Malaysia) merupakan ekonomi yang sangat terbuka. Bagian yang unik dari perdagangan Thailand adalah ekspor jasa, khususnya pariwisata. Ini mungkin menjelaskan kenapa Thailand mengalami defisit perdangan dalam barang, tapi berdasarkan bank dunia dan CIA *WorldFactBook*, memperoleh ekspor bersih barang dan jasa (seperti yang diukur dengan pengeluaran PDB)

Thailand memiliki beragam kelompok mitra dagang, seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 3.6, hal 60. Amerika pada dasarnya merupakan tujuan ekspor untuk Thailand dan dibandingkan dengan Negara anggota ASEAN yang lain. Namun, Tiongkok merupakan tujuan ekspor utama Thailand (11.9 persen) dan sumber impor terbesar ke dua Thailand. (16,4 persen) pada tahun 2013. Seperti

perdagangan Malaysia-Tiongkok, sumber berbeda tidak setuju dengan jumlah pasti neraca perdangan barang.: MOFCOM Tiongkok mengklaim bahwa Tiongkok menerima defisit perdagangan yang memburuk dengan Thailand (lihat Tabel 3.7, hal 61), sampai pada angka 5,7 miliar USD pada tahun 2013: sebaliknya, data bank dunia tahun 2013 menunjukkan bahwa Thailand memiliki defisit perdagangan sebanyak 10 miliar USD dengan Tiongkok.

Table 3.6 Mitra Ekspor dan Impor Thailand

	Exports			Imports	
	Value (US\$ m)	Share (%)		Value (US\$ m)	Share (%)
1 China	\$ 27,238	11.9%	1 Japan	\$ 41,082	16.4%
2 US	\$ 23,017	10.1%	2 China	\$ 37,726	15.0%
3 Japan	\$ 22,235	9.7%	3 UAE	\$ 17,286	6.9%
4 Hong Kong	\$ 13,188	5.8%	4 US	\$ 14,706	5.9%
5 Malaysia	\$ 13,014	5.7%	5 Malaysia	\$ 13,247	5.3%
Other	\$129,835	56.8%	Other	\$126,661	50.5%
Total	\$228,527	100%	Total	\$250,708	100%

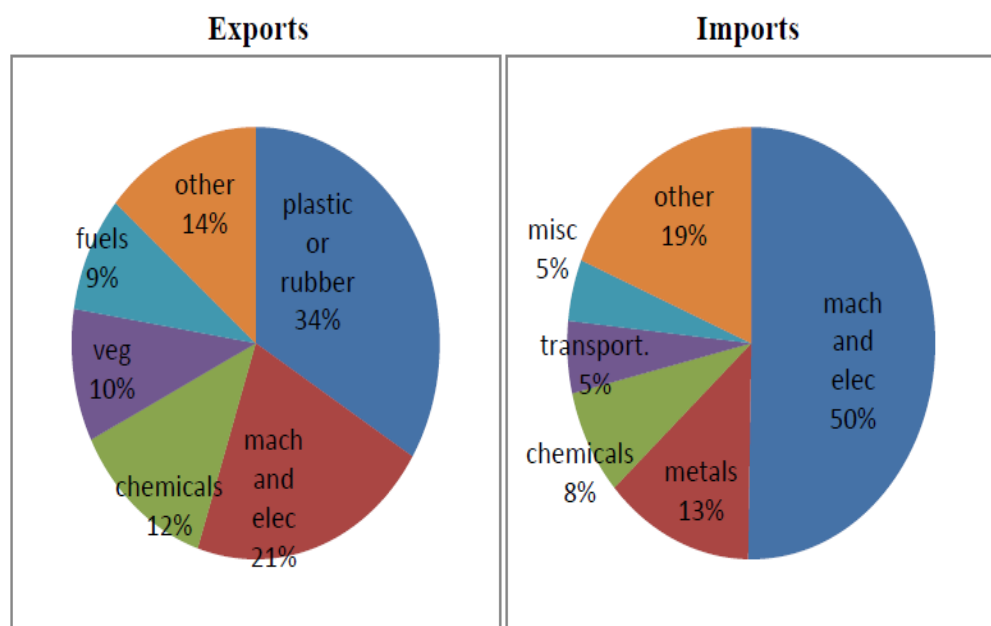
Sumber : World Bank Trade Statistic 2013

Tabel 3.7 Perdagangan Barang Thailand Dengan Tiongkok

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
export	3,828	5,800	7,818	9,763	11,978	15,520	13,326	19,758	25,702	31,223	32,737
import	8,828	11,537	13,993	17,961	22,652	25,636	24,845	33,201	39,040	38,456	38,517
balance	-5,000	-5,737	-6,175	-8,198	-10,673	-10,115	-11,519	-13,442	-13,337	-7,232	-5,780

Sumber : China Ministry of Commerce, via CEIC database 2003-2013

Digram 3.3 Rincian Perdagangan Thailand dengan Tiongkok



Sumber : World Bank Trade Statistic 2013

Sektor pertanian Thailand memberikan kesempatan komersil terhadap ekonominya karena kelompok konsumen urban baru Tiongkok memiliki minat terhadap buah-buahan dan sayur-sayuran dari luar negeri. Namun, produk pertanian Tiongkok sendiri merupakan suatu halangan untuk perdagangan bebas antara kedua negara. Tiongkok menandatangani perjanjian khusus dengan Thailand pada tahun 2003 untuk menghilangkan tarif pada buah dan sayur melalui program *Early Harvest Program* pada

kerangka ACFTA. Namun perjanjian tersebut juga memasukkan berbagai pengecualian yang melindungi Thailand dan Tiongkok

B. Kondisi Ekonomi dan Finansial domestik Tiongkok

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2014 adalah sebanyak 7,4 persen. Tingkat pertumbuhan mengalami perlambatan pada tahun 2013, utamanya disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan aset investasi tetap serta lingkungan yang menantang pada sektor manufaktur. Namun kecepatan rekonstruksi ekonomi bertambah. Presiden Xi Jinping menjelaskan pola ekonomi seperti ini sebagai *new normal economy*, yaitu laju pertumbuhan yang lambat tapi berkelanjutan.³⁹

Ekonomi Tiongkok menurun dengan konsisten sejak partai komunis yang berkuasa mencoba mengganti model ekonomi berdasarkan investasi dan perdagangan dengan pertumbuhan sendiri yang dihasilkan melalui konsumsi domestik. Tiongkok memutuskan untuk menurunkan target pertumbuhan ekonominya menjadi 6,5%-7% untuk tahun 2016 setelah pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Tiongkok hanya sampai pada angka 6,9%, tidak mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebanyak 7%.⁴⁰

³⁹Xi's "new normal" theory', *Xinhuanet.com* (新华网) (http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-11/09/c_133776839.htm) diakses pada 18 Mei 2016

⁴⁰China Cuts 2016 Growth Target <https://www.theguardian.com/business/2016/mar/05/china-cuts-2016-growth-target-amid-continued-economy-concerns>) diakses pada 18 Mei 2016

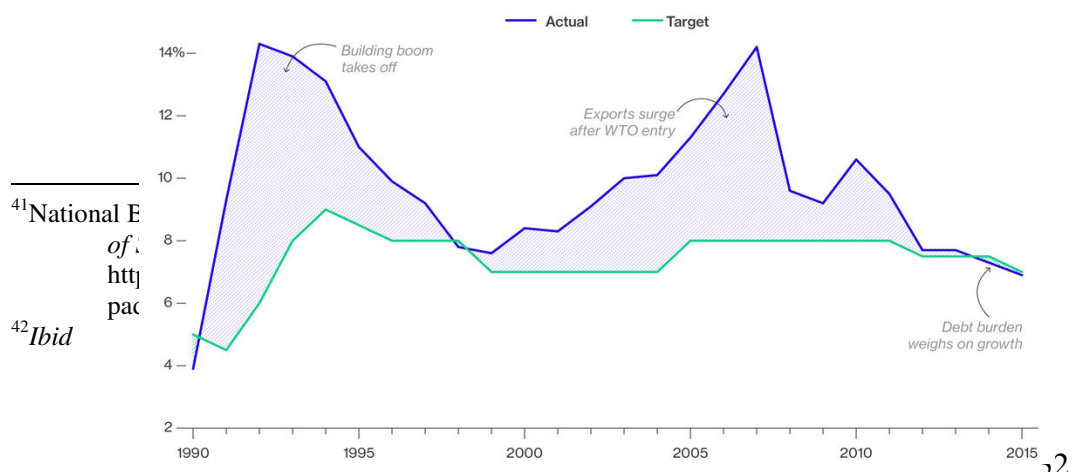
Grafik 3.1 Tingkat pertumbuhan PDB perquarter dari tahun ke tahun, 2011-2014



Sumber : National Bureau Statistic of China (NBS)⁴¹

Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok yang melambat juga menyebabkan defisit pada pendapatan pemerintah yaitu sebanyak 2,18 triliun dollar, sehingga rasio defisit terhadap PDB mencapai 3%, ini merupakan angka defisit tertinggi sejak dibentuknya Republik Masyarakat Tiongkok pada tahun 1949.⁴²

Grafik 3.2 :Target Pertumbuhan PDB vs Pertumbuhan PDB Sebernarnya



Sumber : World Bank, Chinese Target Growth and Actual Growth ⁴³

Penyesuaian yang sementara berlangsung pada *real estate*, pembangunan kapasitas besar-besaran serta ekspor yang melambat mempengaruhi kegiatan industri. Pertumbuhan yang dihasilkan oleh sektor industri menurun dari 7,6 persen (tahun ke tahun) pada quarter ke-4 tahun 2014, menjadi 6,4 persen pada quarter pertama tahun 2015. Penurunan produksi pada industri terjadi pada 3 sektor industri utama yaitu; manufaktur (dari 8,5 persen menjadi 7,2 persen), utilitas (dari 3,3 persen menjadi 2,3 persen) dan tambang dari 3,7 persen menjadi 3,3 persen). Data dengan frekuensi tinggi menunjukkan bahwa aktifitas industri tetap lemah pada bukan Mei 2015 tapi mulai pulih. Hasil industri naik dari 6,1 persen pada Mei (dari setahun sebelumnya) melakukan percepatan dari 5,9 pada bulan April. ⁴⁴

Berbeda dengan pertumbuhan pada sektor industri yang menurun dengan perlahan, pertumbuhan pada sektor jasa terus meningkat. Akibat pertumbuhan lambat pada pendapatan pribadi, permintaan untuk jasa

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ World Bank Staff Calculation based on CEIC Data, China Economy Update June 2015

seperti pariwisata dan pelayanan kesehatan meningkat selama 2 tahun terakhir. Pada quarter pertama tahun 2015, nilai tambah sektor jasa meningkat sebanyak 7,6 persen (sedikit lebih rendah dari tahun quarter sebelumnya yaitu sebanyak 8,4 persen) sebagaimana struktur ekonomi juga terus berubah dari sektor industri ke sektor jasa. Pertumbuhan lebih cepat pada jasa tingkat tinggi seperti perbankan dan asuransi.⁴⁵

Grafik 3.3 Tingkat Ekspor Tiongkok periode April 2015-Jan 2016



Sumber : *www.tradingeconomics.com* I General Administration of Customs⁴⁶

Ekspor Dari Tiongkok meningkat 11.5 persen dari tahun ke tahun sampai mencapai angka 160,86 miliar pada maret 2016, 2,5 persen lebih banyak dari perkiraan pasar. kenaikan pertama terjadi sejak juni 2015 sebagian dikarenakan peningkatan musiman setelah libur tahun baru

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Data Ekspor Tiongkok 2015-2016 (<http://www.tradingeconomics.com/china/exports>) diakses pada 13 Mei 2016

imlek. Dari Januari ke maret 2016, ekspor menurun sampai 9,6 persen. Penjualan ke Hong Kong menurun sebanyak (-6,5 persen), Jepang (-5,5 persen), Korea Selatan (-11.2 persen), Taiwan (-3,7 persen), Negara-negara ASEAN (-13,7 persen), Negara-negara Uni Eropa (-6,9 persen), Afrika Selatan (-29,6 persen), Amerika (-8,8 persen), Brasil (-57.2 persen), Australia (-1,9 persen) dan Selandia Baru (-12,4 persen). Sebaliknya, pengiriman barang ke India dan Rusia meningkat sampai 0,2 persen. Ekspor Tiongkok rata-rata sebanyak 554,41 USD dari 1983 sampai 2016, mencapai ketinggian sepanjang waktu sebanyak 2275.13 USD pada desember 2014 dan terendah sebanyak 13 USD pada januari 1984. Ekspor Tiongkok dilaporkan oleh Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok.⁴⁷

Pada april 2016 ekspor Tiongkok merosot hampir sebanyak 2 persen dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun lalu. Turunnya impor Tiongkok pada bulan april merupakan yang kali ke-18 bulan berturut-turut, menunjukkan bahwa permintaan domestik masih lemah walaupun terjadi penambahan pada pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dan tercatat pertumbuhan kredit pada quarter pertama.⁴⁸

Total nilai ekspor Tiongkok pada bulan April adalah 173 miliar USD dan nilai impor sebanyak 127 miliar USD. Sehingga surplus perdagangannya naik sampai kurang lebih 46 miliar USD.

⁴⁷ Ibid

⁴⁸Ekspor dan Impor Tiongkok <http://www.theguardian.com/world/2016/may/08/chineseconomy-exports-fall-by-2-and-imports-by-11-in-april> diakses pada 15 Mei 2016

Kabinet Tiongkok telah berjanji untuk mendorong ekspor, termasuk mendorong bank untuk memperbanyak pinjaman, memperluas asuransi kredit ekspor dan menaikkan pengembalian pajak bagi beberapa perusahaan. Pemerintah Tiongkok juga berusaha melakukan transisi yang sulit dari ketergantungannya terhadap ekspor murah dan investasi untuk infrastruktur ke industri *hi-tech* dan belanja konsumen sebagaimana model pertumbuhan ekonomi yang telah berlangsung sepanjang tiga dekade menunjukkan tanda kelesuhan.⁴⁹

Grafik 3.4 Tingkat Impor Tiongkok ke ASEAN Periode Jan 2015-Oktober 2015



⁴⁹ *Ibid*

Ss

Sumber : www.tradingeconomics.com⁵⁰

Impor Tiongkok dari ASEAN meningkat sebanyak 18619930 USD pada bulan Desember dari 16084313,61 USD pada bulan November 2015. Impor dari ASEAN di Tiongkok rata-rata mencapai 16554488,21 USD dari 2014-2015, jumlah impor tertinggi sebanyak 22469129,81 USD pada september 2014 dimana impor terendah tercatat sebanyak 11602137 USD pada februari 2015. Impor dari ASEAN ke Tiongkok dilaporkan oleh Bea Cukai Tiongkok.⁵¹

Grafik 3.5 Neraca Perdagangan Tiongkok



⁵⁰ Impor Tiongl
(<http://www.tra>

⁵¹ Ibid

Sumber : www.tradingeconomics.com, General Administration of Customs⁵²

Tiongkok mencatat defisit modal dan finansial sebanyak 843 USD pada quarter ke-4 tahun 2015. Aliran masuk modal di Tiongkok rata-rata mencapai -325.54 USD dari tahun 1998 sampai 2015, mencapai nilai tertinggi sebanyak 114,24 USD pada Quarter ke-3 tahun 2015 dan terendah sebanyak -1305.58 USD pada Quarter ke-4 tahun 2008. Aliran Masuk Modal di Tiongkok dilaporkan oleh Administrasi Nilai Tukar Negara, Tiongkok.⁵³

Pada April 2016, harga consumer turun sebanyak 0,2 persen dari bulan sebelumnya. Penurunan tingkat inflasi pada umumnya mencerminkan harga yang lebih rendah untuk makanan, tembakau, alcohol dan khususnya sayuran segar. Inflasi berada pada tingkat 2,3 persen pada bulan April dan untuk 3 bulan berturut-turut dan sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh analis pasar. Trend ini juga tetap berlanjut ke April dengan pertumbuhan rata-rata pada harga harga konsumen tetap seperti bulan sebelumnya yaitu 1,7 persen. Sementara itu index harga produsen turun 3,4 persen pada bulan April dari bulan yang sama tahun lalu.

⁵² Neraca Perdagangan Tiongkok (<http://www.tradingeconomics.com/china/balanceoftrade>) diakses pada 13 Mei 2016

⁵³ Ibid

C. Kebijakan Moneter Tiongkok

Untuk merespon pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat, PBOC banyak mengeluarkan kebijakan moneter yang bersifat ekstrim dan dianggap berbahaya. Sejak Juni 2015, PBOC tercatat telah menyuntikkan dana sebanyak 1,8 triliun yuan untuk menunjang ekonomi Tiongkok yang melambat melalui campuran fasilitas likuiditas yang telah ditargetkan. Suntikan dana oleh PBOC tersebut setara dengan *quantitative easing* selama lebih dari tiga bulan pada program pembelian sekuritas The Fed.⁵⁴

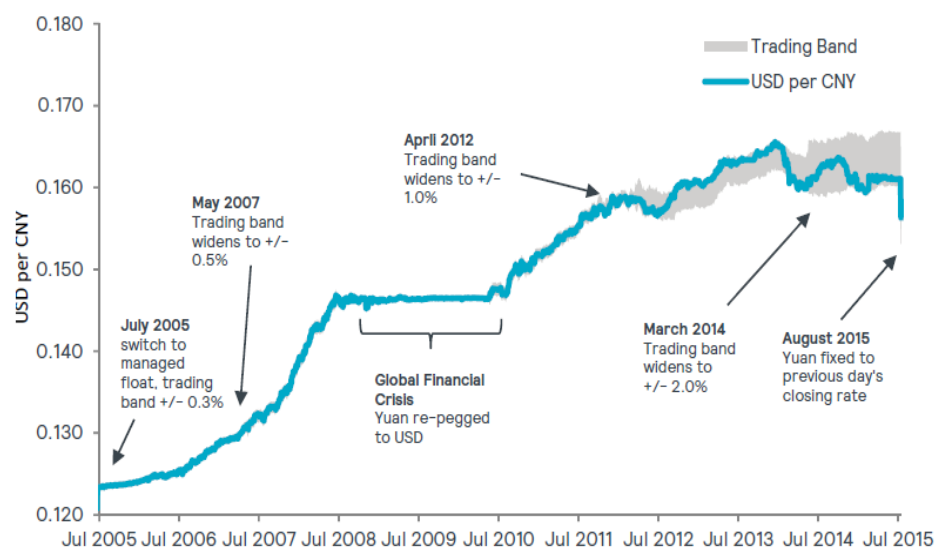
Pada 11 Agustus 2015, PBOC mengumumkan perubahan pada pengaturan patokan harian Yuan. Dalam istilah praktikal, kebijakan baru ini mewakili liberalisasi rezim valuta asing, yang sesuai dengan keinginan pemerintah Tiongkok untuk menjadikan Yuan sebagai mata uang internasional. Pada rezim sebelumnya, Yuan dikontrol dengan ketat, menjadikannya sebagai mata utama dunia dengan tingkat goncangan yang paling rendah. Langkah baru untuk menerapkan rezim mengambang secara alami membawa lebih banyak goncangan dan kemungkinan pergerakan harian yang lebih besar, sesuai dengan pesaing Yuan pada tingkat global.

Yuan pernah dipatok dengan Dollar Amerika sampai Juli 2005, saat rezim mengambang teratur “*managed float*” mulai diperkenalkan.

⁵⁴The People's Bank of China <http://www.economist.com/news/leaders/21633818-chinas-central-bank-should-cut-interest-rates-and-explain-clearly-why-it-doing-so-peoples> diakses pada 19 Mei 2016

Pada tahun-tahun berikutnya, jangkauan dagang meluas secara perlahan; dari $\pm 0,3$ persen pada akhir 2005, menjadi ± 2 persen pada maret 2014 dan seterusnya (hanya terganggu oleh pematokan ulang sementara selama krisis finansial besar-besaran). Dalam kerangka yang terbaru, PBOC akan menentukan *reference rate*⁵⁵ harian setiap pagi, dan Yuan boleh diperdagangkan selama setiap hari dalam jangkauan ± 2 persen. *Reference rate* ditentukan oleh PBOC, tapi akhir-akhir ini harga nilai tukar pasar (*market spot price*) terkadang memiliki perbedaan yang signifikan dengan patokan resmi.

Grafik 3.6 Sejarah Kebijakan Nilai Tukar Tiongkok

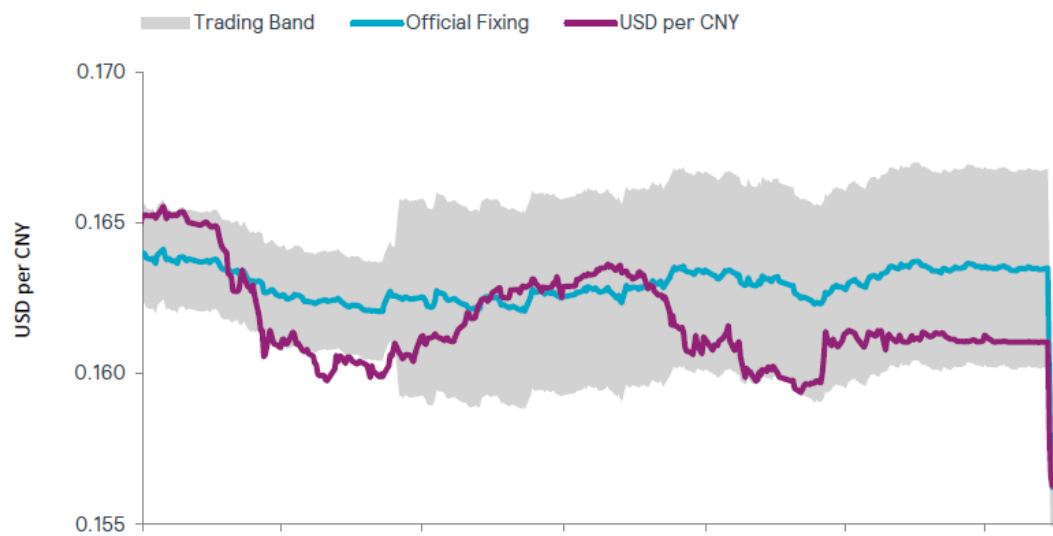


⁵⁵Referer floating swap)http diakses p

Sumber : Bloomberg, Chinese Exchange Rate in 2005-2015

Pada pengaturan yang baru yang mulai diterapkan pada awal Agustus 2015, *reference rate* ditentukan berdasarkan harga tutup hari sebelumnya, sementara jangkauan dangannya tetap pada ± 2 persen. Pengaturan baru ini pada awalnya menyebabkan penurunan Yuan sebanyak 1,9 persen (penurunan harian terbesar pada penerapan pengaturan sebelumnya tahun 2005), karena Yuan telah ditutup di hari sebelumnya dekat dengan jangkauan bawah yang dibolehkan. Walaupun menurut PBOC, keputusan tersebut hanya dilakukan sekali saja “*one-off move*” untuk menciptakan keseimbangan antara *reference rate* dan *market spot price*, bank dipaksa untuk menentukan *reference rate* hari selanjutnya pada bagian bawah jangkauan dangang (dari nilai bagian bawah baru), menyebabkan devaluasi yang lebih lanjut yaitu sebanyak 1,6 persen.

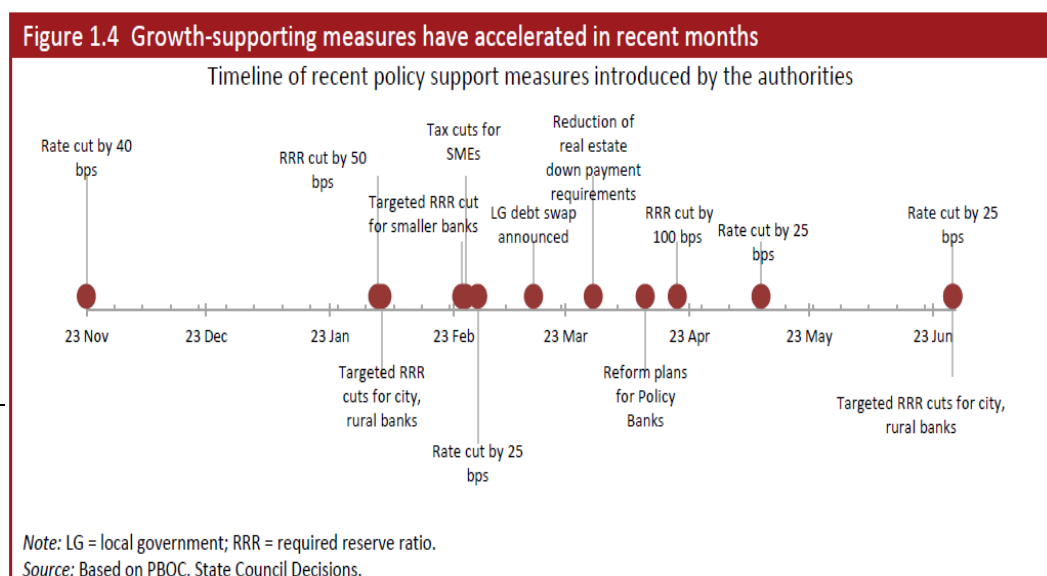
Grafik 3.7 Devaluasi Yuan



Sumber : Bloomberg, Chinese Yuan Devaluation

Selain melakukan perubahan pada rezim valuta asingnya (dari yang dipatok menjadi mengambang), PBOC juga menggunakan instrumen moneter yang lain untuk menanggapi kondisi ekonomi domestiknya. PBOC dengan sengaja memilih cara yang rumit untuk mengurangi persyaratan moneter (pada dasarnya menyediakan uang jangka tengah (*medium term money*) yang lebih murah untuk beberapa bank, dan tidak kepada bank lainnya. Hal ini digunakan sebagai benteng pertahanan pertama pemerintah Tiongkok. Di tempat yang lain, bank sentral memotong suku bunga sampai hampir nol sebelum beralih ke kebijakan yang tidak biasa. Di Tiongkok tingkat bunga pinjaman adalah 6%.⁵⁶

Gambar 1 Target Utama Ekonomi Makro PBOC



*Sumber : DBS Group Research*⁵⁷

Untuk menerapkan tahapan-tahapan stimulus yang telah ditargetkan, pemerintah Tiongkok berfokus pada peningkatan permintaan jangka pendek sementara mengizinkan penyesuaian struktural ke arah model ekonomi yang berkelanjutan, dukungan kebijakan telah menjadi lebih intensif dan lebih banyak diterapkan dengan menggunakan instrumen konvensional seperti pelonggaran kebijakan dan dukungan fiskal untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya, untuk memberikan dukungan pada aktivitas diantara regulasi yang makin ketat pada pinjaman antar bank dan pinjaman bank agen. PBOC terus melonggarkan kebijakan moneter, menurunkan deposit patokan dan tingkat pinjaman, membuat target pemotongan pada rasio cadangan wajib. Usaha untuk mengurangi hambatan administratif juga terus diupayakan.⁵⁸

Karena investasi publik merupakan salah satu alat untuk menstabilisasi pertumbuhan, penyeimbangan dalam negeri dari ketergantungan yang besar pada investasi bergerak pada tingkatan yang terukur. Pertumbuhan investasi aset tetap (ukuran yang luas yang juga meliputi penjualan tanah dan pembelian modal yang telah dipakai)

⁵⁷ Economics, China : Recalibrating Monetary Policy, DBS Group Research 2015

⁵⁸ Ibid

menurun ke 15,2 persen pada tahun 2014, dari 19,4 persen pada tahun 2013. Pada quarter pertama tahun 2015, pertumbuhan investasi semakin melambat menjadi 13,5 persen. Beberapa dari faktor diatas (kelebihan kapasitas pada industri berat utama, pengetatan kebijakan pada sektor dengan penggunaan energi yang intensif, merosotnya penjualan dan pembangunan *real estate*, regulasi mengekang pada bank bayangan) telah menahan investasi swasta. Pada waktu yang sama, investasi publik menguat. Pada quarter pertama tahun 2015, investasi pada infrastruktur tercatat sebagai pertumbuhan saham terbesar pada investasi saham tetap, mengalahkan kontribusi sektor manufaktur.

Intervensi kebijakan PBOC banyak berfokus pada penemuan sumber pendanaan baru. Selain menganjurkan kerja sama pemerintah-swasta “*public-private partnerships*” sebagai model pendanaan pembangunan infrastruktur baru, telah ada banyak usaha untuk memaksimalkan kegunaan kebijakan. Selanjutnya pada April 2015, Dewan Negara memperluas kegunaan dana keamanan sosial untuk membeli sekuritas pemerintah lokal serta instrumen finansial lainnya. Peraturan baru membolehkan untuk berinvestasi sampai 20 persen dari portofolionya pada utang pemerintah lokal dan sekuritas perusahaan. (sebelumnya, dana yang boleh diinvestasikan sampai 10 persen dari portofolionya pada pinjaman *trust*, tapi tidak ada pada utang pemerintah lokal). Pada bulan Mei 2015, Dewan Negara mewacanakan untuk

melanjutkan penyediaan bantuan finansial terhadap pendanaan pemerintah lokal untuk pembangunan proyek lokal yang sementara berlangsung.⁵⁹

Pada Februari 17 2016, RMB secara keseluruhan telah turun sebanyak 4,9 persen terhadap USD, sejak 11 Agustus 2015 (hari dimana Tiongkok memulai prosedur baru untuk menurunkan nilai tukarnya). Pemerintah Tiongkok telah melakukan intervensi untuk mendukung RMB dan arus keluar modal yang terbatas. Dengan nilai surplus yang diperkirakan mencapai 350 miliar USD pada tahun 2016, atau kurang lebih sebanyak 3 persen dari PDB Tiongkok, dan cadangan uang sebanyak 3,2 triliun, Tiongkok memiliki sumber daya cadangan uang asing yang sangat besar untuk mendukung RMB. Akan tetapi perlambatan pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus berlanjut, kemungkinan untuk melakukan devaluasi sepihak (mematok harga RMB) atau menggunakan harga pasar (*floating currency*), tidak dapat dengan cepat ditolak.⁶⁰

Secara historis, PBOC telah menargetkan jumlah uang dari pada harga uang itu sendiri. Contohnya, sampai baru-baru ini, deposit bank komersil dan tingkat pinjaman di Tiongkok tidak ditentukan dengan bebas tapi diwajibkan oleh pemerintah. Represi finansial tersebut menghasilkan biaya modal yang sengaja ditekan, yang selanjutnya menghasilkan *malinvestment* di proyek yang umumnya dapat menguntungkan. Selain itu,

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ George R Hoguet. 2007. *A Very Basic Introsuction to Chinese Monetary Policy*. Investment Solution Group: Global Investment Strategies

pemerintah juga telah (dan masih berlanjut) memberikan kredit pada usaha yang diinginkannya.

Walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan, Tiongkok kini telah meliberalisasi deposit dan tingkat utangnya dan bergerak ke arah rezim yang menargetkan “harga uang”, seperti yang dilakukan oleh The Fed pada saat dia mengubah *The Fed Fund Rate*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1) Kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok sejak tahun 2005 sampai sekarang merupakan kebijakan moneter ekspansif. Strategi kebijakan moneter Tiongkok dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Pada tingkat domestik, Tiongkok mendevaluasi Yuan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahunan pemerintah dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor (guna menghasilkan surplus pada neraca perdagangan Tiongkok). Sementara pada tingkat global, Tiongkok mengganti rezim nilai tukar terpatok menjadi mengambang sebagai langkah untuk memasukkan Yuan kedalam kerangka SDR IMF dan membendung hegemoni Amerika Serikat di Asia Timur dan Tenggara, khususnya pada pakta perdagangan *Tans-Pacific Partnership*. Walaupun kedua faktor internal dan eksternal terlihat saling bertentangan (dengan digunakannya Yuan sebagai mata uang cadangan IMF, pemerintah Tiongkok melalui PBOC akan mengalami kesulitan dalam melakukan intervensi seperti yang sementara dilakukan saat ini), namun melalui penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Tiongkok menganut *dual monetary policy objectives* dalam menerapkan kebijakan moneternya. Dengan kata lain, Tiongkok masih melakukan intervensi dalam menentukan

jangkauan dangang valutenya (rezim mengambang teratur) di pasar valuta asing, namun kedepannya Tiongkok ingin agar Yuan digunakan sebagai alat transaksi pada operasi IMF dan perdagangan internasional dimana harga nilai tukar Yuan akan ditentukan berdasarkan mekanisme pasar (*market-spot price*). *Dual monetary policy objective* dilakukan mengingat inflasi, suku bunga dan tingkat pengangguran berfluktuasi sepanjang waktu mengikuti situasi ekonomi dan finansial dunia. Oleh karena itu, kebijakan moneter di suatu negara harus mencerminkan kondisi ekonomi sementara negara tersebut serta kondisi ekonomi yang diharapkan kedepannya (*economic outlook*). Devaluasi Yuan mencerminkan kondisi ekonomi Tiongkok yang melemah akibat turunnya harga komoditas minyak dunia, sementara transisi perlahan-lahan rezim valuta asing Tiongkok dari yang tetap menjadi mengambang merupakan indikasi tujuan ekonomi jangka panjang Tiongkok sebagai salah satu negara yang paling berpengaruh dalam perdagangan internasional.

- 2) Kebijakan moneter Tiongkok berdampak negatif terhadap ekspor-impor, pasar stok dan pasar valuta asing di Kawasan ACFTA, khususnya terhadap Indonesia, Malaysia dan Thailand. Ekspor Tiongkok ke Indonesia, Malaysia dan Thailand mengalami peningkatan sementara impor dari ketiga negara tersebut ke Tiongkok mengalami penurunan. Tiongkok merupakan pasar ekspor terbesar bagi Indonesia, Malaysia, Thailand dan begitu juga sebaliknya.

Dengan demikian, kebijakan moneter di Tiongkok dapat berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi ketiga negara tersebut serta perdagangan internasional di Kawasan ACFTA secara keseluruhan. Penemuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam periode beberapa tahun terakhir (khususnya semenjak rentetan devaluasi yuan yang dimulai pada tahun, Tiongkok telah banyak mengorbankan kepentingan ekonomi kawasan perdagangan yang dia motori (ACFTA), demi mencapai kepentingan ekonomi domestiknya. Hal ini tentunya berpengaruh kepada *leverage* Tiongkok kedepannya di ASEAN, sementara ini Tiongkok dianggap sering mewakili kepentingan ekonomi bersama negara-negara ASEAN yang mayoritasnya merupakan negara berkembang.

B. SARAN

- 1) Seperti yang dikatakan oleh Presient Xi Jinping, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang tidak sampai pada target pertumbuhan sebanyak 7 persen pada tahun 2015 adalah pertumbuhan ekonomi baru yang disebut “*new normal*”, dimana Tiongkok ingin merubah struktur ekonominya dari yang bergantung pada ekspor menjadi ekonomi yang dapat bertahan malalui konsumsi domestik. Devaluasi Yuan menjadikan ekonomi Tiongkok semakin bergantung pada sektor ekspor, sementara ekspor sangat bergantung pada permintaan dan harga komoditas di pasar internasional. Kondisi seperti ini akan

membuat ekonomi Tiongkok menjadi sangat rentan terhadap krisis ekonomi global seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Devaluasi Yuan hanya menguntungkan perusahaan ekspor Tiongkok dan tidak banyak meningkatkan daya beli penduduk kelas menengah ke bawah (khususnya kaum buruh) sebab perusahaan tersebut membayar buruh mereka dengan menggunakan Yuan yang telah mengalami devaluasi.

- 2) Dengan akan digunakannya Yuan sebagai mata uang SDR IMF pada Oktober 2016, PBOC seharusnya mulai membangun kepercayaan komunitas internasional (khususnya negara anggota ACFTA) terhadap Yuan sebagai mata uang yang stabil dan bebas dari manipulasi nilai tukar yang kerap kali dipraktikkan. Devaluasi Yuan pada awal Agustus tahun 2015 (beberapa saat sebelum Yuan menjadi mata uang SDR IMF), bukan lah hal yang strategis bagi posisi Yuan nantinya yang akan bersaing dengan Dollar, Pound, Yen, Euro. Walaupun rezim nilai tukar di suatu negara bukan kriteria mata uang SDR IMF, PBOC tetap harus membangun kepercayaan masyarakat internasional terhadap Yuan agar mereka mau melakukan transaksi dengan Yuan dan permintaan terhadap Yuan di pasar valuta asing meningkat, mengingat Yuan memiliki nilai tukar yang paling representatif terhadap nilai tukar negara berkembang yang umumnya menggunakan Dollar.